

Pengaruh Pendapatan Asil Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

Ni Putu Ayu Septiyani Putri¹, Gede Adi Yuniarta²



^{1,2,3}Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

*Corresponding author: ayu.septiyani@undiksha.ac.id

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PAD, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2017-2021. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang terdiri dari 8 Kabupaten dan 1 Kota, dengan jumlah sampel sebanyak 45 secara sampling jenuh dengan total 180 data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun anggaran 2017-2021 dan data statistik. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda yang dianalisis menggunakan SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Keywords: Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; Belanja Modal; Kinerja Keuangan.

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of local government revenue (PAD), intergovernmental revenue, and capital expenditure on the financial performance of Regency/City Regional Governments in Bali Province in 2017-2021. The population in this study were all regencies/cities in Bali Province consisting of 8 regencies and 1 city, with a total sample size of 45 by saturated sampling with a total of 180 data. This study uses secondary data in the form of Regency/City Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Reports in Bali Province for the 2017-2021 fiscal year and statistical data. Hypothesis testing in this study used multiple linear regression which was analyzed using SPSS 26. The results showed that the variable local government revenue (PAD) had a positive and significant effect on local government financial performance. While, the variables of intergovernmental revenue and capital expenditure have a negative and insignificant effect on the financial performance of local governments.

Keywords: Local Government Revenue; Intergovernmental Revenue; Capital Expenditure; Financial Performance

Pendahuluan

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya peningkatan kinerja ekonomi daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangannya sendiri dan dalam mengambil keputusan yang dianggap sesuai dengan kepentingan daerah, sehingga nantinya diharapkan dapat semakin meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Provinsi Bali merupakan salah satu dari provinsi yang ada di Indonesia yang menerapkan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pemberian hak, wewenang dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dalam kerangka desentralisasi fiskal demi kebutuhan akan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah (Rahayu dan Dewi, 2022). Provinsi Bali menjadikan otonomi daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang memiliki tujuan dan arah yang jelas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penilaian kinerja keuangan dari suatu pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dikarenakan pemerintah pusat menerapkan kebijakan otonomi daerah dengan menaruh harapan bahwa pemerintah daerah akan dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya dengan tujuan agar proses pembangunan yang dilakukan pada daerah akan dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kinerja keuangan pemerintah daerah akan menunjukkan tingkat pencapaian dari hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode tertentu, sehingga pemerintah diharapkan mampu menghasilkan kinerja yang optimal dengan rancangan anggaran yang telah ditetapkan dan disahkan sebelumnya. Kemampuan dalam mengelola keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terlihat pada APBD seperti kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya serta kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah dan pelayanan sosial yang diberikan untuk masyarakat.

Alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu dengan menerapkan rasio keuangan terhadap APBD. Rasio-rasio tersebut diantaranya adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio pertumbuhan pendapatan daerah, yang bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif ataupun negatif.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang berperan dalam mengelola keuangan daerah sangat penting untuk meminimalkan terjadinya penurunan pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya dengan meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan sumber-sumber keuangan (Putri dan Darmayanti, 2019). Berdasarkan fenomena yang ada menurut data Statistik Keuangan Ppada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali bahwa ditinjau dari segi pertumbuhannya, pendapatan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali cenderung mengalami fluktuasi pada tahun 2017-2021. Pada tahun 2018 pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Buleleng mengalami penurunan sebanyak 12 persen dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali lainnya sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan 2019 pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Badung mengalami kenaikan masing-masing hingga 3 sampai 4 persen dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Provinsi Bali lainnya. Diketahui pula di tahun 2020 pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Badung mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga 25 persen dan kembali mengalami penurunan sebanyak 7 persen pada tahun 2021. Begitupun dengan Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar yang juga mengalami penurunan pada tahun yang sama.

Pertumbuhan pendapatan daerah dipengaruhi oleh seberapa besar pemerintah daerah mendapatkan sumber-sumber keuangan daerah untuk nantinya mampu menghasilkan pendapatan bagi daerahnya. Sejalan dengan diterapkannya otonomi daerah, maka pemerintahan di Provinsi Bali harus berjalan dengan baik agar nantinya dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan otonomi daerah tersebut dapat dilihat dari PAD, namun kenyataan pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana bantuan pusat yang disebut dengan dana perimbangan (Putri dan Darmayanti, 2019). PAD dan dana perimbangan memiliki peranan yang besar bagi sumber pembiayaan pembangunan daerah yang nantinya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Tuntutan agar pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah disebabkan karena saat ini kewenangan pemerintah pusat lebih banyak dilimpahkan kepada daerah. Dalam desentralisasi, pemberian wewenang kepada pemerintah daerah tidak berarti pemerintah pusat lepas tangan, salah satu bentuk peran pemerintah pusat yaitu lewat dana perimbangan yang berkontribusi pada APBD (Ayu, 2018). Menaikkan anggaran belanja daerah yang besar merupakan upaya untuk mendapatkan jumlah transfer yang besar (Saputri, 2020). Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa masih kurang optimalnya pengelolaan keuangan daerah sehingga hal tersebut menimbulkan konsekuensi logis yang harus diterima oleh pemerintah daerah yaitu buruknya penilaian kinerja keuangan daerah tersebut. Alokasi dana belanja modal akan banyak membantu daerah untuk memperoleh sumber keuangan yang berasal dari potensi daerah yang nantinya dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah, sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah dan infrastruktur yang tersedia dengan baik diharapkan mampu menciptakan efisiensi di berbagai sektor.

PAD adalah pendapatan yang bersumber dari kegiatan ekonomi pada daerah itu sendiri. Kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut, dan semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat (Budianto dan Alexander, 2016). Penelitian Saraswati dan Rioni (2019) memberikan hasil bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat mencerminkan bahwa PAD dapat memiliki kontribusi untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Machmud dan Radjak (2018) memberikan hasil bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Darmayanti (2019) menemukan bahwa PAD menunjukkan adanya pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Badjra, Mustanda, dan Abudanti 2017). Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah pusat dengan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Machmud dan Radjak (2018) memberikan hasil bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Heryanti *et al.* (2019) mengemukakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Wahyudin dan Hastuti (2020) memberikan hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2019) dan Niswani *et al.* (2022)

menemukan hasil yang sama bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Anggreni dan Sri Artini, (2019) menyatakan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Prastiwi dan Aji, (2020) memberikan hasil bahwa belanja modal tidak berdampak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini dilakukan karena masih adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh PAD, dan perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Analisis PAD, dana perimbangan, dan belanja modal dilakukan guna melihat seberapa besar pengaruh yang dihasilkan oleh masing-masing variabel tersebut terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting dilakukan karena merupakan cerminan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021”

Masalah yang dapat dirumuskan berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut. Apakah PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, dan apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara PAD terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, untuk mengetahui pengaruh antara dana perimbangan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, dan untuk mengetahui pengaruh antara belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh PAD, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi khususnya akuntansi sektor publik. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengaruh PAD, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Teori keagenan berawal dari penelitian yang dilakukan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling tahun 1976 yang berjudul “*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure*”. Teori keagenan merupakan suatu hubungan yang terjalin berdasarkan kontrak perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama disebut prinsipal dan pihak yang lainnya disebut dengan agen (Verawaty et al., 2020). Tujuan dari teori ini adalah untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul dan memastikan bahwa agen bekerja sesuai dengan harapan pemilik. Dalam penelitian ini, *principal* adalah masyarakat yang memberikan tugas kepada pemerintah daerah sebagai *agent*-nya untuk melaksanakan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan bagian penting dari tugas pemerintah daerah sebagai *agent*. Dalam kenyataannya pemerintah daerah akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugasnya sehingga hal itu akan mempengaruhi masyarakat (*principal*) dalam menilai kinerja pemerintah daerah (*agent*).

Awal munculnya teori *stakeholder* diperkenalkan oleh *Standford Research Institute* (RSI) pada tahun 1963. Teori *stakeholder* mengansumsi hubungan pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam pemerintahan yang sepatutnya harus menekankan aspek

kepentingan rakyat selaku *stakeholder* (Eksandy et al., 2019). Pemerintah daerah yang berhasil dalam mengelola keuangan dapat membantu memenuhi kepentingan *stakeholder* secara lebih efektif. Dengan mengelola anggaran dan sumber daya dengan efisien, pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat, memenuhi kewajiban keuangan kepada pemerintah nasional dan lembaga keuangan, serta memberikan dukungan kepada sektor usaha dan organisasi masyarakat yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan daerah.

Dalam teori keagenan dapat dilihat hubungan antara pemerintah daerah sebagai agen dengan masyarakat sebagai prinsipal, pemerintah daerah akan bertindak sesuai dengan tugas yang telah di berikan oleh masyarakat dalam membuat kebijakan dan mengesakan anggaran demi meningkatkan PAD. Dalam teori *stakeholder*, dimana pemerintah daerah mengelola kekayaan daerah seperti pendapatan hasil pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah untuk mengembangkan potensi daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai *stakeholder* dan juga meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Saputri (2020) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Saraswati dan Rioni (2019) juga mengemukakan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, Putri dan Darmayanti (2019) menemukan bahwa PAD menunjukkan adanya pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Dalam teori keagenan, pemerintah daerah sebagai agen wajib mengurus masyarakat sebagai prinsipal, tugasnya mengurangi kesenjangan antara masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dengan memberikan pelayanan yang baik melalui dana perimbangan. Dalam teori *stakeholder*, dimana pemerintah daerah dapat mengelola transfer dana dari pusat yang diterima daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah pusat sebagai *stakeholder* dan juga meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Nugroho dan Prasetyo (2018) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Wahyudin dan Hastuti (2020) memberikan hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, Aji dan Mukhibad (2020) menyatakan terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan pada dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Dalam teori keagenan dimana pemerintah daerah sebagai agen wajib mengurus masyarakat sebagai prinsipal karena belanja modal diarahkan untuk membantu membiayai kegiatan daerah dalam pengadaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik yang memadai. Dalam teori *stakeholder* dimana pemerintah daerah dapat mengelola dana belanja daerah khususnya belanja modal seperti belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja operasional jalan, dan belanja aset lainnya untuk memajukan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai *stakeholder* dan juga meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Mulyani dan Wibowo (2017) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Andirfa et al. (2016) menemukan

hasil bahwa belanja modal berpengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian Atmoko dan Khairudin (2022) yang mengungkapkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Metode Penelitian

Penelitian ini ialah jenis penelitian asosiatif atau hubungan kausalitas dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian dimulai dengan merumuskan permasalahan yang didasari oleh latar belakang, menguraikan teori-teori dan dasar empiris sebagai interpretasi hasil penelitian nantinya, menetapkan waktu dan lokasi penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data dan kemudian menyajikan hasil analisis. Populasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota diantaranya Kabupaten Jembrana Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu dilakukan secara sensus atau sampling jenuh. Metode sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel dengan mengambil semua data populasi (Saputri, 2020). Dalam penelitian ini jumlah yang diambil adalah populasi terbatas sehingga peneliti mengambil jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2017-2021, dengan pengambilan dari total PAD, dana perimbangan, belanja modal, dan pendapatan daerah. Jumlah total sebanyak 45 sampel dengan total 180 data.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah PAD, dana perimbangan, dan belanja modal. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Metode pengumpulan data yang dipakai pada riset berikut yaitu metode observasi non partisipan dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam penelitian tetapi hanya sebagai pengamat independen yang dilakukan dengan cara observasi melalui studi pustaka dan teknik dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari *website* Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dan *website* Portal Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Teknik analisis dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linear berganda dengan menggunakan aplikasi komputer SPSS 26. Sebelum diolah ke dalam analisis linear berganda, terlebih dahulu data akan dilakukan analisis statistik deskriptif dan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

Hasil dan Pembahasan

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Hasil analisis statistik deskriptif pada penelitian ini disajikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah (X1)	45	10433	483519	72276,49	111044,454
Dana Perimbangan (X2)	45	57020	137645	90305,69	20690,060
Belanja Modal (X3)	45	5714	124111	26529,82	22605,111
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	45	-32,57	15,23	-,6880	11,02643
<i>Valid N (listwise)</i>	45				

Sumber: Data Diolah (2023), *Output SPSS 26 for Windows*

Berdasarkan tabel 1 diketahui hasil analisis deskriptif variabel kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2017-2021 memiliki nilai rata-rata (*mean*) adalah sebesar -0,6880 dan simpangan baku (*standard deviation*) sebesar 11,02643. Nilai minimum adalah sebesar -32,57 ditunjukkan oleh Kabupaten Badung pada tahun 2020. Nilai maksimum adalah sebesar 15,23 ditunjukkan oleh Kabupaten Gianyar pada tahun 2019.

Variabel PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2017-2021 memiliki nilai rata-rata (*mean*) adalah sebesar 72276,49 atau Rp 72.276.490.000,00 dan simpangan baku (*standard deviation*) sebesar 111044,454 atau Rp 111.044.454.000,00. Nilai minimum adalah sebesar 10433 atau Rp 104.330.000,00 ditunjukkan oleh Kabupaten Bangli pada tahun 2020. Nilai maksimum adalah sebesar 483519 atau Rp 4.835.190.000,00 ditunjukkan oleh Kabupaten Badung pada tahun 2019.

Variabel dana perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2017-2021 memiliki nilai rata-rata (*mean*) adalah sebesar 90305,69 atau Rp 90.305.690.000,00 dan simpangan baku (*standard deviation*) sebesar 20690,060 atau Rp 20.690.060.000,00. Nilai minimum adalah sebesar 57020 atau Rp 570.200.000,00 ditunjukkan oleh Kabupaten Badung pada tahun 2017. Nilai maksimum adalah sebesar 137645 atau Rp 1.376.450.000,00 ditunjukkan oleh Kabupaten Buleleng pada tahun 2017.

Variabel belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2017-2021 memiliki nilai rata-rata (*mean*) adalah sebesar 26529,82 atau Rp 26.529.820.000,00 dan simpangan baku (*standard deviation*) sebesar 22605,111 atau Rp 22.605.111.000,00. Nilai minimum adalah sebesar 5714 atau Rp 57.140.000,00 ditunjukkan oleh Kabupaten Bangli pada tahun 2020. Nilai maksimum adalah sebesar 124111 atau Rp 1.241.110.000,00 ditunjukkan oleh Kabupaten Badung pada tahun 2017.

Uji asumsi klasik diawali dengan melakukan uji normalitas. Pada penelitian ini model regresi dapat dikatakan sudah berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan melakukan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Data penelitian dikatakan sudah terdistribusi normal ditandai dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 5% (0,05).

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		45
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1,30319883
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,116
	<i>Positive</i>	,116

	<i>Negative</i>	-,072
<i>Test Statistic</i>		,116
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,151 ^c
<i>a. Test distribution is Normal.</i>		

Sumber: Data Diolah (2023), *Output SPSS 26 for Windows*

Berdasarkan tabel 2 berikut dapat diketahui bahwa data penelitian sudah terdistribusi normal ditandai dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari taraf signifikan yaitu 5% atau 0,05. Hasil pengujian *Kolmogorov-Smirnov* telah menjelaskan bahwa nilai signifikansi adalah sejumlah 0,151. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasannya data residu memiliki distribusi normal dikarenakan signifikan besaran *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih tinggi daripada 5% atau 0,05.

Uji multikolinieritas dianalisis dengan melihat nilai dari *variance inflation factor* (VIF). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2011). Model regresi dikatakan bebas dari multikolinieritas jika nilai *tolerance* lebih dari 10% atau nilai VIF kurang dari 10.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

<i>Coefficients^a</i>			
Model		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	VIF
1	Pendapatan Asli Daerah (X1)	,832	1,203
	Dana Perimbangan (X2)	,910	1,099
	Belanja Modal (X3)	,782	1,278

a. *Dependent Variable:* Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Sumber: Data Diolah (2023), *Output SPSS 26 for Windows*

Berdasarkan tabel 3 berikut disajikan uji multikolinieritas data. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *tolerance* variabel bebas lebih dari 10% atau 0,1 dimana nilai *tolerance* dari PAD sebesar 0,832 dana perimbangan sebesar 0,910, dan belanja modal sebesar 0,782. Nilai VIF kurang dari 10 dimana nilai VIF dari PAD sebesar 1,203, dana perimbangan sebesar 1,278, belanja modal sebesar 1,099. Dengan demikian bisa dibuat kesimpulan tak adanya multikolinieritas diantara variabel independen didalam riset berikut.

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians maupun residual dari suatu riset. Pengujian heteroskedastisitas dapat teranalisis lewat pengujian glejser. Model regresi dikatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas jika nilai signifikansi variabel bebas terhadap residual absolut lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 5% atau 0,05.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Coefficients^a</i>			
Model		T	Sig.
		1	<i>(Constant)</i>
Pendapatan Asli Daerah (X1)	1,546		,130
Dana Perimbangan (X2)	-,168		,867
Belanja Modal (X3)	1,369		,179

a. *Dependent Variable: ABRESID*

Sumber: Data Diolah (2023), *Output SPSS 26 for Windows*

Berdasarkan tabel 4 nilai sig PAD sejumlah 0,130, dana perimbangan sejumlah 0,867, dan belanja modal sejumlah 0,179. Artinya semua nilai signifikan variabel bebas lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam model regresi ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi dilakukan untuk mendeteksi adanya korelasi antara data pada masa sebelumnya dengan data sesudahnya. Model uji yang baik adalah terbebas autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan uji Durbin-Watson terhadap variabel pengganggunya. Tidak terjadi autokorelasi jika $dU < d < 4-dU$, maka dalam penelitian ini harus dapat dibuktikan bahwa nilai Durbin-Watson terletak diantara dU dan $4-dU$.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

<i>Model Summary^b</i>					
Model	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	,632 ^a	,496	,462	2,27974	2,219

a. *Predictors: (Constant), Belanja Modal (X3), Dana Perimbangan (X2), Pendapatan Asli Daerah (X1)*

b. *Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)*

Sumber: Data Diolah (2023), *Output SPSS 26 for Windows*

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai DW yaitu sebesar 2,219. jumlah sampel sebanyak 45, serta jumlah variabel independen sebanyak 3 variabel ($k=3$), maka dari tabel Durbin-Watson dengan signifikansi 0,05 diperoleh nilai dU sebesar 1,6662 sehingga $4-dU$ adalah sebesar 2,3338 maka hasilnya $1,6662 < 2,219 < 2,3338$. Berdasarkan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Setelah pengujian asumsi klasik terpenuhi, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis. Adapun hipotesis pada penelitian ini diuji dengan analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji hipotesis yang pertama dilakukan uji analisis linier berganda.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

<i>Coefficients^a</i>					
Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
(<i>Constant</i>)	9,021	7,906		,779	,441
1 <i>Pendapatan Asli Daerah (X1)</i>	2,028	,000	,379	2,365	,023
<i>Dana Perimbangan (X2)</i>	-1,088	,000	-,182	-1,188	,242

Belanja Modal (X3)	-2,705	,000	-,093	-,055	,956
--------------------	--------	------	-------	-------	------

a. *Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)*

Sumber: Data Diolah (2023), *Output SPSS 26 for Windows*

Berdasarkan tabel 6, persamaan regresi linier berganda penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 9,021 + 2,028X_1 - 1,088X_2 - 2,705X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

X1 = Pendapatan Asli Daerah

X2 = Dana Perimbangan

X3 = Belanja Modal

α = Konstanta

ε = Standar Error

Maka dari persamaan diatas adalah nilai konstanta sebesar 9,021 menunjukkan bahwa apabila PAD, dana perimbangan, dan belanja modal dianggap konstan menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat sebesar 9,021 persen. Nilai koefisien regresi PAD sebesar 2,028 menunjukkan bahwa apabila PAD meningkat sebesar satu persen menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan sebesar 0,226 persen dengan anggapan bahwa variabel lainnya konstan. Nilai koefisien regresi dana perimbangan sebesar -1,088 menunjukkan bahwa apabila dana perimbangan meningkat sebesar satu persen menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah menurun sebesar 1,088 persen dengan anggapan bahwa variabel lainnya konstan. Nilai koefisien regresi dana perimbangan sebesar -2,705 menunjukkan bahwa apabila dana perimbangan meningkat sebesar satu persen menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah menurun sebesar 2,705 persen dengan anggapan bahwa variabel lainnya konstan.

Uji yang dilakukan selanjutnya adalah uji t. Uji parsial atau uji t merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 5 % dan *degree of freedom* (df) = n – k. Hasil pengujian parsial dapat dilihat pada tabel 6 mengenai analisis regresi linier berganda, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut. Nilai signifikansi PAD adalah sebesar 0,023 yang lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu sebesar 0,05 dan nilai t hitung sebesar 2,365 yang lebih besar dari t tabel yaitu 2,018. Hasil analisis ini memberikan arti bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai koefisien regresi PAD sebesar 2,028 menunjukkan adanya pengaruh positif antara PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai signifikansi dana perimbangan adalah sebesar 0,242 yang lebih besar dari taraf signifikansi yaitu sebesar 0,05 dan nilai t hitung sebesar -1,188 yang lebih kecil dari t tabel yaitu 2,018. Hasil analisis ini memberikan arti bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai koefisien regresi dana perimbangan sebesar -1,088 menunjukkan adanya pengaruh negatif antara dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai signifikansi dana perimbangan adalah sebesar 0,956 yang lebih besar dari taraf signifikansi yaitu sebesar

0,05 dan nilai t hitung sebesar -0,055 yang lebih kecil dari t tabel yaitu 2,018. Hasil analisis ini memberikan arti bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai koefisien regresi dana perimbangan sebesar -2,705 menunjukkan adanya pengaruh negatif antara dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Setelah uji t, maka uji yang dilakukan selanjutnya adalah uji koefisien determinan (R²). Uji koefisien determinan (R²) dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Adapun rekapitulasi hasil pengujian koefisien determinasi dapat di lihat pada tabel 7 berikut.

Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi

<i>Model Summary^b</i>				
Model	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,632 ^a	,496	,462	2,27974

a. *Predictors:* (Constant), Belanja Modal (X3), Dana Perimbangan (X2), Pendapatan Asli Daerah (X1)

b. *Dependent Variable:* Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Sumber: Data Diolah (2023), *Output SPSS 26 for Windows*

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,462. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel PAD, dana perimbangan, dan belanja modal memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provisi Bali yaitu sebesar 46,2%. Sedangkan sisanya sebesar 53,8% adalah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,023 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $2,365 > t$ tabel 2,018. Nilai koefisien menunjukkan tanda positif sebesar 2,028. Maka keputusan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2017-2021. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan memberikan indikasi bahwa PAD yang dihasilkan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2017-2021 memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2017-2021. PAD yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat kemampuan sumber daya keuangan suatu daerah yang nantinya akan digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Jika PAD sebuah daerah tersebut rendah, artinya persentase PAD dalam pembiayaan pembangunan akan rendah, hingga kemandirian dari daerah itu pula akan kecil serta dibalikinya apabila jumlah persentase PAD itu lebih besar, jadi tingkat mandiriya sebuah daerah itu akan meningkat atau lebih besar (Anggreni dan Artini, 2019).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Verawaty *et al.* (2020), Heryanti *et al.* (2019) dan Leki *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil serupa juga diungkapkan oleh Atmoko dan Khairudin (2022) serta Haryanto (2019) bahwa PAD berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan

hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Machmud dan Radjak (2018) memberikan hasil bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, serta penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Darmayanti (2019) menemukan bahwa PAD menunjukkan adanya pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keagenan bahwa sebagai prinsipal pemerintah daerah telah bertindak sesuai dengan tugas yang di berikan oleh masyarakat dalam membuat kebijakan dan mengesakan anggaran yang terlaksana dengan baik sehingga dapat meningkatkan PAD. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori *stakeholder*, pemerintah daerah telah mengelola kekayaan daerah seperti pendapatan hasil pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah untuk mengembangkan potensi daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,242 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $-1,188 < t$ tabel 2,018. Nilai koefisien menunjukkan tanda negatif sebesar -1,088. Maka keputusan H2 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2017-2021. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan memberikan indikasi bahwa dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2017-2021 belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2017-2021. Semakin besar dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat maka dapat mencerminkan ketergantungan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya semakin besar sehingga kemampuan daerah tersebut dalam menggali potensi dari daerahnya sendiri semakin rendah, sehingga besar kecilnya penerimaan dana perimbangan sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2018) serta Wahyudin dan Hastuti (2020) memberikan hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggreni dan Artini (2019), Aji dan Mukhibad (2020) serta Verawaty et al. (2020) yang menyatakan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,956 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $-0,055 < t$ tabel 2,018. Nilai koefisien menunjukkan tanda negatif sebesar -2,705. Maka keputusan H3 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2017-2021. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan memberikan indikasi bahwa kegiatan belanja modal yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2017-2021 belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2017-2021. Penggunaan anggaran belanja modal pada setiap pemerintah daerah yang tidak diarahkan pada semua kegiatan yang sifatnya investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang belum dimaksimalkan dengan baik, sehingga hasil yang diberikan dari belanja modal ini belum memberikan nilai yang positif terhadap

peningkatan kinerja keuangan daerah, sehingga kinerja keuangan daerah yang diharapkan belum tercapai dengan maksimal.

Hasil penelitian tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dan Wibowo (2017) serta Andirfa *et al.* (2016) bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Atmoko dan Khairudin (2022), Heryanti *et al.* (2019) serta Fernandes dan Putri (2022) yang menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2017-2021. Hasil ini mengindikasikan bahwa PAD yang telah dihasilkan oleh setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Bali memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2017-2021. Dana perimbangan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2017-2021. Hasil ini mengindikasikan bahwa dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2017-2021 belum mampu dengan baik memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2017-2021. Belanja modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2017-2021. Hasil ini mengindikasikan bahwa kegiatan belanja modal yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2017-2021 belum mampu dengan baik memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2017-2021.

Saran yang diberikan pada penelitian ini yaitu pertama, bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali bahwa kemampuan menghasilkan PAD dari setiap daerah perlu dipertahankan dan juga dilakukan upaya untuk peningkatan menggali dan memanfaatkan sumber daya pada setiap daerahnya. Pemerintah daerah akan memiliki kinerja yang baik dalam mengelola keuangan daerahnya jika kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri segala kegiatan daerahnya meningkat. Pemerintah daerah juga perlu mengontrol kegiatan belanja daerahnya agar lebih efektif dan efisien. Kedua, bagi masyarakat bahwa masyarakat selaku pengendali pemerintah dapat mendukung program pemerintah dengan memberikan kritik dan saran serta menyampaikan aspirasinya untuk pemerintah yang lebih baik dengan cara sesuai ketentuan. Ketiga, bagi penelitian selanjutnya disarankan menambah dan mengubah periode penelitian dan lokasi penelitian, sehingga bias untuk generalisasi hasil penelitian yang berkaitan dengan pengukuran dengan periode yang singkat tersebut bisa dihindari oleh peneliti. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan dan mengubah variabel independen yang belum diteliti pada penelitian ini, sehingga akan bisa mendapatkan hasil dari koefisien determinasi yang lebih maksimal dikarenakan pada penelitian ini masih tergolong rendah. Dan, penelitian selanjutnya mengubah rasio yang digunakan dalam penelitian, dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan, rasio ketergantungan, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio desentralisasi fiskal, dan lain sebagainya.

References

Aji, M. W., & Mukhibad, H. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal*

Akuntansi Dan Governance Andalas, 3(1), 97–115. www.jaga.unand.ac.id

- Andirfa, Mulia, & Hasan Basri (2016). “Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh”. *Jurnal Magister Akuntansi*, 5(3), 30-38.
- Anggreni, N. K. A., & Sri Artini, L. G. (2019). Pengaruh Pad, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(3), 1315. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i03.p06>
- Atmoko, C. A., & Khairudin. (2022). Dampak Pendapatan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 291–296. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1295>
- Ayu, P. P. (2018). Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 3(1), 80. <https://doi.org/10.29407/jae.v3i1.12007>
- Badjra, I. B., Mustanda, I. K., & Abudanti, N. (2017). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 29. <https://doi.org/10.30659/jai.6.1.29-40>
- Budianto, & Alexander, S. (2016). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(4), 844–851.
- Eksandy, A., Hakim, M. Z., & Ekawati. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 85–94. <https://doi.org/10.31000/competitive.v2i2.917>
- Fernandes, J., & Putri, S. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah pada 19 kabupaten/kota provinsi sumatera barat tahun 2017-2020. *Jurnal Revenue*, 3(1), 198–209.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang, Indonesia : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryanto, L. H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–10.
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, W., & Suryono, B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1). <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i1.1721>
- Leki, Y., Naukoko, A. T., & Sumua, J. I. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(5), 164–174.
- Machmud, J., & Radjak, L. I. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 17–32. <https://doi.org/10.21070/jas.v2i1.1106>

- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015). *Kompartemen*, XV(1), 57–66.
- Niswani, N., Ikhyannuddin, I., Firdaus, R., & Nurhasanah, N. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(1), 65. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6367>
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(1), 89–105. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.45>
- Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5), 2834. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i05.p09>
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Rahayu, K. N. S., & Dewi, L. G. K. (2022). Pengaruh Transparansi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(2), 464–471.
- Saputri, S. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Riset Dan Akuntansi*, 1999(23), 452–459.
- Saraswati, D., & Rioni, Y. S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), 110–120.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Verawaty, Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Mbia*, 19(1), 21–37. <https://doi.org/10.33557/mbia.v19i1.560>
- Wahyudin, I., & Hastuti. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, Vol. 1 No.(1), 86–97.